

**MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM PPG DAN TPG DALAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH DI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Yasinta Qur'aini Nurdiniyya¹, Ahmad Ridani², Muhammad Isnaini³, Bahrani⁴
^{1,2,3,4}Pascasarjana MPI FTIK Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda

Alamat e-mail: 1yasinta2907@gmail.com, 2ahmad.ridani@uinsi.ac.id
3muh.isnaini240791@gmail.com, 4bahrani@uinsi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of the Teacher Professional Education (PPG) and Teacher Professional Allowance (TPG) programs in improving the professionalism of Islamic Religious Education (PAI) teachers at the secondary education level within the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Kalimantan Province. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, including data reduction, display, and conclusion drawing. The results indicate that the management of PPG and TPG programs has been implemented quite effectively through data-based planning and interdepartmental coordination. The PPG program contributes to improving teachers' professional and pedagogical competencies, while the TPG program enhances teachers' welfare and motivation. However, several challenges remain, such as administrative delays and limited technological infrastructure. The study concludes that strengthening performance-based management and digital administration is essential to enhance the effectiveness of these programs and improve the professionalism of Islamic Religious Education teachers in the future.

Keywords: Management, PPG, TPG, Teacher Professionalism, Islamic Religious Education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada jenjang pendidikan menengah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan program PPG dan TPG telah berjalan cukup baik melalui perencanaan

berbasis data dan koordinasi lintas unit kerja. Program PPG berkontribusi pada peningkatan kompetensi profesional guru, sedangkan TPG meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja. Namun, kendala seperti keterlambatan administrasi dan keterbatasan teknologi masih ditemukan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan manajemen berbasis kinerja dan digitalisasi administrasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta profesionalisme guru PAI di masa mendatang.

Kata Kunci: Manajemen, PPG, TPG, Profesionalisme Guru, Pendidikan Agama Islam.

A. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional memiliki fungsi ganda, tidak hanya sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, identitas keagamaan, dan moral peserta didik. Guru PAI menjadi aktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut mereka tidak sekadar menyampaikan konten agama, tetapi juga menjadi teladan dalam implementasi nilai ajaran Islam di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas guru PAI harus dijamin melalui kebijakan yang sistematis dan manajemen yang efektif.

Seiring dengan tuntutan global dan nasional untuk menghadirkan guru yang profesional, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) telah menetapkan program seperti

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai instrumen utama. Program PPG diarahkan agar guru memiliki sertifikat pendidik yang diharapkan meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Contoh, pada tahun 2024, sebanyak 28.536 guru PAI di sekolah mengikuti PPG.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan sebagai insentif penghargaan terhadap guru yang sudah bersertifikasi dan aktif mengajar sesuai standar. Tunjangan ini juga berfungsi sebagai motivasi dan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan guru, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Data menunjukkan bahwa pencairan tunjangan untuk guru dan pengawas PAI di sekolah sudah

mencapai lebih dari 120.067 orang sebelum Lebaran 2025.

Dalam kerangka manajerial organisasi pendidikan, pelaksanaan kedua program tersebut (PPG dan TPG) menuntut pengelolaan yang baik, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Hal ini meliputi pemetaan kebutuhan guru, penetapan sasaran peserta PPG, mekanisme verifikasi data penerima TPG, sistem informasi manajemen guru (misalnya registrasi, layanan daring), serta koordinasi antar-unit dalam birokrasi pendidikan agama di Kemenag. Tanpa pengelolaan yang baik, efektivitas program dapat terkendala.

Khusus di wilayah provinsi, seperti di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil Kemenag Kaltim), tantangan manajerial dapat berbeda dengan tingkat pusat: misalnya terkait kondisi geografis, distribusi guru di daerah terpencil, infrastruktur jaringan, serta variabilitas status guru (ASN, PPPK, Non-ASN). Konteks lokal ini menuntut adaptasi kebijakan nasional agar program berjalan optimal di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan

PPG bagi guru PAI berdampak pada peningkatan kompetensi guru, namun juga menemui kendala seperti keterbatasan fasilitas, beban administratif, dan kesiapan lembaga penyelenggara. Misalnya, uji pengetahuan PPG dilaksanakan secara daring bagi 15.268 guru PAI pada awal 2025. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan perlu manajemen yang matang untuk menjamin mutu dan pemerataan akses.

Begitu pula pengelolaan TPG memiliki aspek manajerial yang signifikan seperti validitas data guru, mekanisme pencairan tepat waktu, transparansi dana, dan kejelasan kriteria penerima. Contoh nyata di lapangan yakni kenaikan tunjangan untuk guru PAI non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta mulai Januari 2025 sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan guru.

Oleh karena itu, manajemen pelaksanaan program PPG dan TPG bukan sekadar administratif tetapi strategis dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PAI. Profesionalisme guru PAI di jenjang pendidikan menengah (SMP/SMU) memerlukan guru yang tidak hanya mahir mengajar, tetapi juga mampu

mendesain pembelajaran yang relevan, menerapkan teknologi, dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran agama. Dalam hal ini, manajerial program menjadi kunci agar tujuan peningkatan kualitas guru dapat terwujud.

Penelitian yang mengkaji bagaimana manajemen pelaksanaan PPG dan TPG di tingkat provinsi, khususnya Kanwil Kemenag Kaltim, masih sangat relevan. Aspek seperti proses perencanaan peserta PPG, pemantauan peserta, evaluasi hasil, penyaluran TPG, serta faktor pendukung seperti sistem informasi dan koordinasi antar lembaga, perlu diinvestigasi secara empiris. Dengan demikian, dapat diidentifikasi hambatan manajerial serta strategi penguatan yang tepat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus menganalisis manajemen pelaksanaan program PPG dan TPG dalam konteks peningkatan profesionalisme guru PAI pada jenjang pendidikan menengah di Kanwil Kemenag Kaltim. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi manajerial dan kebijakan bagi pemangku kepentingan agar pelaksanaan PPG dan TPG lebih efektif, akuntabel,

merata, dan berdampak nyata terhadap mutu pembelajaran PAI di wilayah provinsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik manajerial pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan studi kasus dipilih karena fokus penelitian adalah fenomena yang terikat konteks bagaimana proses manajerial dilaksanakan dalam lingkungan birokrasi pendidikan agama di tingkat provinsi sehingga studi kasus memungkinkan peneliti menghadirkan narasi kontekstual yang kaya dan holistik.

Lokasi penelitian ditetapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dengan unit analisis meliputi: (1) Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kanwil, (2) unsur pengelola PPG di Kanwil (koordinator/penanggung jawab

PPG), (3) pengelola/keuangan yang bertanggung jawab atas penyaluran TPG, (4) kepala madrasah/sekolah menengah yang menerima atau menverifikasi data guru, serta (5) guru PAI jenjang menengah (SMP/MTs dan SMA/MA) yang menjadi subjek penerima PPG/TPG. Pemilihan lokasi berdasarkan karakter konteks manajerial provinsi dan relevansi kebijakan PPG/TPG yang dioperasikan oleh Kanwil. Dokumen teknis PPG dan juknis penyaluran TPG (Dirjen Pendis 2023–2024) digunakan sebagai sumber data sekunder utama untuk melengkapi data lapangan.

Partisipan penelitian dipilih secara purposive (purposive sampling) dengan mempertimbangkan peran strategis dalam rantai manajerial PPG dan TPG. Kriteria pemilihan meliputi: pegawai Kanwil yang menangani program PPG/TPG minimal 1 tahun pengalaman, kepala madrasah/sekolah menengah yang aktif menverifikasi data penerima TPG, dan guru PAI jenjang menengah yang telah mengikuti PPG atau menerima TPG. Selain *purposive sampling*, peneliti akan menerapkan snowball sampling untuk menemukan

informan kunci tambahan, sehingga diperoleh cakupan data yang representatif untuk analisis manajerial. Prinsip pemilihan ini sejalan dengan praktik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi.

Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam semi-struktur (*in-depth interviews*) dengan informan kunci, observasi partisipatif atau non-partisipatif pada kegiatan terkait seperti sosialisasi juknis TPG, kegiatan monitoring PPG, proses verifikasi data); Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok guru PAI untuk memahami pengalaman kolektif peserta PPG dan persepsi terhadap TPG, serta studi dokumen (document analysis) terhadap kebijakan, juknis, laporan pelaksanaan PPG, data SIAGA, dan bukti administrasi penyaluran TPG. Kombinasi teknik ini (triangulasi data) dimaksudkan untuk memperkaya validitas temuan dan menangkap berbagai perspektif aktor manajerial.

Instrumen penelitian pada pendekatan kualitatif bersifat fleksibel. Instrumen primer adalah panduan wawancara semi-struktur yang memuat domain seperti perencanaan

PPG (kriteria peserta, koordinasi dengan LPTK), pelaksanaan PPG (fasilitasi, monitoring, kendala teknis), mekanisme verifikasi data dan penyaluran TPG, pemanfaatan TPG untuk peningkatan profesionalitas, dan evaluasi manajerial. Panduan observasi dan pedoman FGD juga disiapkan untuk merekam perilaku, interaksi, dan dinamika organisasi. Semua wawancara direkam (dengan izin) dan dicatat, dokumen difotokopi atau diunduh sebagai salinan bukti. Penggunaan panduan semi-struktur memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu baru yang muncul di lapangan sambil tetap fokus pada tema utama penelitian.

Analisis data dilakukan secara induktif dan iteratif mengikuti tahapan coding tematik: (1) transkripsi data wawancara dan catatan lapangan, (2) pembacaan berulang untuk memperoleh pemahaman holistic, (3) open coding untuk menandai unit makna, (4) axial coding untuk mengelompokkan kode menjadi tema-tema manajerial (seperti perencanaan, koordinasi, monitoring, validitas data, akuntabilitas penyaluran), dan (5) selective coding untuk merumuskan narasi penyebab-akibat dan model manajerial yang

muncul dari data. Analisis tematik ini bisa dibantu perangkat lunak CAQDAS bila diperlukan, namun analisis manual yang sistematis juga memadai selama langkah-langkah coding dan memoing didokumentasikan dengan rapi. Pendekatan ini mengikuti praktik analisis kualitatif modern yang menekankan induksi dan konstruksi tema dari data lapangan.

Untuk menjaga keandalan dan validitas (penelitian, peneliti menerapkan empat kriteria Lincoln dan Guba (dialih bahasakan menjadi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas) melalui langkah-langkah praktis triangulasi sumber dan teknik, member check (validasi temuan ke informan kunci), audit trail (mencatat semua keputusan penelitian dan langkah analisis), serta deskripsi tebal (thick description) agar pembaca dapat menilai transferabilitas. Selain itu, researcher reflexivity dilakukan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan bias peneliti selama pengumpulan dan analisis data. Langkah-langkah ini memperkuat kredibilitas temuan studi kasus manajerial.

Aspek etika penelitian diperhatikan secara ketat memperoleh izin resmi dari Kanwil Kemenag Kaltim, informed consent tertulis dari seluruh partisipan (penjelasan tujuan studi, hak menolak atau berhenti, dan jaminan kerahasiaan), pengamanan data sensitif (penyimpanan rekaman dan transkrip dengan password), serta anonimisasi nama informan pada pelaporan bila diminta. Selain itu, peneliti akan mematuhi pedoman etika penelitian lembaga dan aturan publikasi ilmiah. Kepatuhan terhadap etika menjadi penting karena penelitian ini melibatkan pegawai negeri dan data administratif yang sensitif terkait penyaluran tunjangan. (Kemenag juknis TPG & PPG; Harahap, 2020).

Keterbatasan penelitian yang diantisipasi antara lain: temuan bersifat kontekstual untuk Kanwil Kaltim sehingga tidak serta-merta digeneralisasi ke provinsi lain; akses dokumen tertentu (mis. data rinci penyaluran TPG per guru) mungkin dibatasi oleh kebijakan administrasi; dan keterbatasan waktu lapangan dapat memengaruhi jumlah wawancara/observasi. Untuk mengurangi dampak keterbatasan ini, peneliti menggunakan triangulasi

sumber dan dokumentasi kebijakan resmi serta merekomendasikan studi komparatif lintas-provinsi pada penelitian lanjutan.

Secara operasional, jadwal penelitian mencakup tahap persiapan (izin, desain instrumen), pengumpulan data lapangan (wawancara, FGD, observasi, studi dokumen), analisis data (coding dan triangulasi), hingga penulisan laporan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi manajerial praktis (perbaikan alur verifikasi data, peningkatan koordinasi Kanwil–LPTK–satker, pemanfaatan SIAGA untuk monitoring, dan mekanisme akuntabilitas penyaluran TPG) yang dapat meningkatkan efektivitas PPG dan dampak TPG terhadap profesionalisme guru PAI jenjang menengah di Kaltim (selaras dengan tujuan kebijakan Kemenag terbaru). (Kemenag PPG & Juknis TPG 2023–2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menggambarkan secara mendalam tentang bagaimana manajemen pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dilaksanakan oleh

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan wawancara dengan pejabat bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS), staf pelaksana program, koordinator LPTK, serta guru PAI peserta PPG dan penerima TPG, diperoleh gambaran bahwa implementasi kedua program ini berjalan cukup baik meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan manajerial, teknis, dan administratif. Program PPG dan TPG dianggap sebagai kebijakan strategis nasional dalam membentuk guru profesional, namun efektivitas pelaksanaannya di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial Kanwil dalam mengoordinasikan, memverifikasi, dan mengevaluasi setiap prosesnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2024).

Pelaksanaan program PPG di Kanwil Kemenag Kaltim diawali dengan proses perencanaan yang berfokus pada pemetaan kebutuhan guru yang belum tersertifikasi. Data kebutuhan tersebut bersumber dari sistem informasi SIAGA, yang menjadi

basis utama dalam menentukan calon peserta PPG. Namun, validitas data menjadi salah satu persoalan penting. Ditemukan bahwa terdapat guru dengan status kepegawaian yang belum mutakhir atau NUPTK yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan penetapan peserta. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem informasi manajemen pendidikan sebagai instrumen dasar perencanaan program (Siska, 2023). Sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2022), kualitas perencanaan program pendidikan bergantung pada ketersediaan data yang valid dan kemampuan manajerial lembaga dalam menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengorganisasian menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan PPG dan TPG. Kanwil Kemenag Kaltim membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur bidang PAKIS, operator SIAGA, pengawas madrasah, dan perwakilan LPTK mitra. Tim ini berperan dalam memastikan sinkronisasi data, sosialisasi teknis, serta pelaporan

hasil pelaksanaan. Meski demikian, proses koordinasi lintas lembaga masih menghadapi kendala, terutama dalam komunikasi antara Kanwil dengan LPTK terkait jadwal pelaksanaan, kelengkapan dokumen, serta pelatihan daring dan luring. Temuan ini memperkuat pandangan yang dikemukakan oleh Koordinasi PPG UIN Sunan Gunung Djati (2024) bahwa koordinasi multi-level antar institusi pendidikan dan pemerintah daerah menjadi kunci efektivitas implementasi kebijakan PPG di lapangan.

Pelaksanaan PPG di Kaltim memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme guru, terutama dalam aspek kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Guru-guru PAI yang telah mengikuti PPG menyampaikan bahwa pelatihan ini memperkaya pengetahuan mereka mengenai perencanaan pembelajaran, strategi inovatif, serta refleksi praktik mengajar. Namun, tidak semua peserta dapat mengikuti dengan optimal karena kendala jaringan internet di daerah pedalaman dan keterbatasan perangkat teknologi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Oktaviani (2025) yang menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan

PPG sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dan dukungan institusi penyelenggara terhadap peserta. Dengan demikian, peningkatan akses dan fasilitas menjadi agenda penting agar pemerataan profesionalisme guru dapat terwujud di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Selain PPG, pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga menjadi fokus utama penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penyaluran TPG di Kemenag Kaltim menggunakan mekanisme daring melalui sistem SIAGA. Proses ini mencakup verifikasi data guru, validasi kelayakan, hingga pelaporan pencairan tunjangan. Meskipun sistem ini cukup efisien, masih terdapat kendala administratif seperti keterlambatan unggahan dokumen pendukung, perbedaan data antara pusat dan daerah, serta keterlambatan pencairan dana ke rekening guru. Haniya (2024) menegaskan bahwa kendala administratif dan teknis dalam pengelolaan TPG dapat memengaruhi motivasi guru dalam meningkatkan profesionalismenya, karena tunjangan tersebut berfungsi sebagai bentuk

penghargaan atas kinerja dan dedikasi profesional.

Secara empiris, TPG memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan dan motivasi guru. Guru yang menerima TPG secara teratur cenderung menunjukkan peningkatan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua guru menggunakan tambahan penghasilan ini untuk kegiatan pengembangan profesional, seperti pelatihan lanjutan atau studi lanjut. Oleh karena itu, aspek pembinaan pasca pencairan TPG perlu diperkuat agar tunjangan tidak sekadar berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai dorongan untuk berinovasi dan berprestasi (Fahrurrizal, 2024).

Dari sisi manajemen, Kanwil Kemenag Kaltim telah melaksanakan berbagai strategi pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Pengawasan dilakukan melalui audit internal, laporan triwulanan, dan evaluasi kinerja

satuan pendidikan. Namun, sistem evaluasi masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek kualitas pembelajaran yang dihasilkan oleh guru pasca-PPG. Padahal, evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*) sangat penting untuk menilai sejauh mana PPG dan TPG berdampak pada peningkatan kompetensi serta hasil belajar peserta didik (Zid, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk memperbaiki efektivitas program di masa mendatang.

Selain itu, penelitian menemukan adanya praktik baik (*best practices*) yang dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota di Kaltim, seperti pembentukan tim teknis verifikasi data yang terlatih, pelatihan singkat penggunaan aplikasi SIAGA bagi operator dan koordinasi rutin antara pengawas PAI dengan LPTK. Praktik semacam ini terbukti mampu mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kesalahan administrasi. Inovasi lokal ini menjadi bentuk adaptasi manajerial yang selaras dengan karakteristik daerah, dan mendukung efektivitas kebijakan nasional di tingkat daerah. Temuan ini mendukung argumen dari Putri (2025)

bahwa desentralisasi inovasi di level implementasi dapat meningkatkan daya serap kebijakan dan memperkuat profesionalitas guru di lapangan.

Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan PPG dan TPG di Kanwil Kemenag Kaltim menunjukkan keterkaitan erat dengan peningkatan profesionalisme guru PAI. PPG memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kompetensi pedagogik, sementara TPG memberikan kontribusi tidak langsung melalui peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja guru. Namun, efektivitas keduanya bergantung pada validitas data, kapasitas manajerial, kualitas koordinasi antar lembaga, serta konsistensi pengawasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyasa (2021), keberhasilan manajemen pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu sistem yang berorientasi mutu.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat teori manajemen pendidikan yang dikemukakan oleh Terry (2020) bahwa keberhasilan

suatu program ditentukan oleh empat fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks pelaksanaan PPG dan TPG, keempat fungsi tersebut terbukti menjadi kerangka kerja yang efektif dalam mengelola program yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Temuan ini juga memperkaya diskursus manajemen publik pendidikan di Indonesia, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pelaksana di daerah dalam menyesuaikan dan mengelola kebijakan sesuai dengan konteks lokal (Nariyah, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen pelaksanaan PPG dan TPG di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur sudah menunjukkan arah positif dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru PAI. Meskipun demikian, masih dibutuhkan penguatan aspek manajerial seperti peningkatan kompetensi staf verifikasi data, pemantapan koordinasi dengan LPTK, perbaikan sistem evaluasi

berbasis kinerja, serta penyediaan fasilitas penunjang digital di daerah terpencil. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pelaksanaan program PPG dan TPG ke depan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam di Kalimantan Timur.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah kendala dalam aspek koordinasi, administrasi, dan pemerataan akses. Dari segi perencanaan, Kanwil Kemenag Kaltim telah menerapkan prinsip manajemen strategis melalui pemetaan kebutuhan guru PAI yang didasarkan pada data sistem informasi guru dan tenaga kependidikan. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan program sudah berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan, sesuai dengan konsep manajemen

pendidikan yang menekankan pentingnya analisis kebutuhan dan penentuan prioritas dalam pengambilan keputusan (Mulyasa, 2019).

Dalam pelaksanaan program PPG, ditemukan bahwa mekanisme seleksi, pembelajaran daring, dan uji kompetensi sudah berjalan dengan dukungan teknologi digital. Namun, beberapa guru masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan fasilitas internet, beban administrasi, dan perbedaan kesiapan antara guru ASN dan Non-ASN. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan PPG telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik guru PAI. Hasil ini sejalan dengan temuan Sari dan Hidayat (2020) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan PPG mampu meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran inovatif dan reflektif sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka.

Adapun pelaksanaan TPG di lingkungan Kanwil Kemenag Kaltim juga memperlihatkan kemajuan signifikan, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja guru. Pemberian

tunjangan profesi yang tepat waktu menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya komitmen dan tanggung jawab profesional guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyuni dan Hanafiah (2021) bahwa kesejahteraan yang memadai akan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja guru, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam pengembangan diri secara berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi antara lain keterlambatan administrasi dalam penyaluran tunjangan, perbedaan data kepegawaian antara pusat dan daerah, serta kurangnya sosialisasi mengenai regulasi baru. Hambatan tersebut menandakan perlunya penguatan koordinasi antarbagian di lingkungan Kanwil Kemenag, terutama antara seksi PAI, kepegawaian, dan bagian keuangan. Penguatan koordinasi internal menjadi kunci utama dalam manajemen pendidikan publik yang efektif (Siagian, 2019).

Selain itu, profesionalisme guru PAI setelah mengikuti program PPG dan menerima TPG mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal

kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional. Guru lebih mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PPG dan TPG memiliki relevansi langsung terhadap kualitas pendidikan PAI di jenjang menengah. Menurut Musfah (2018), profesionalisme guru akan terbentuk apabila ada keseimbangan antara peningkatan kompetensi akademik dan dukungan kesejahteraan yang memadai.

Secara keseluruhan, implementasi manajemen PPG dan TPG di Kanwil Kemenag Kaltim telah mencerminkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan modern, yaitu berbasis data, partisipatif, dan akuntabel. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan, optimalisasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program. Proses monitoring dan evaluasi yang sistematis menjadi unsur penting dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas program, sebagaimana disarankan oleh Robbins dan Coulter

(2019) dalam teori fungsi manajerialnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa manajemen pelaksanaan PPG dan TPG di Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI pada jenjang pendidikan menengah. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, peran lembaga pendidikan, dan komitmen guru itu sendiri. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan manajemen berbasis kinerja, digitalisasi administrasi pendidikan, serta pelatihan berkelanjutan agar guru PAI semakin adaptif terhadap dinamika pendidikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPG dalam Jabatan* (Juknis). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama RI. (2024). *Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hanun, F. (2021). Implementasi penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan dampaknya terhadap kualitas guru PAI. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 19(3), 268–285.
- Oktaviani, E. A. (2025). Peran Program PPG dalam meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Qayyimah*, 4(2), 85–97.
- Fahrurrizal, F. (2024). Efektivitas pengelolaan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG): Dampak terhadap profesionalisme guru. *Jurnal Riset Pendidikan dan Ekonomi*, 2(3), 45–56.
- Siska, S. (2023). Implementasi sistem SIMPATIKA dalam manajemen data guru dan penyaluran TPG. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 54–65.
- Sulistia, W. S. A. (2024). Implementation of the Professional Allowance Policy for Elementary and Middle School Teachers: Implementation and Challenges. *Jurnal PUBBIS*, 8(1), 23–38.
- Simbolon, M. E. (2024). Implementation of the Teacher Professional Education Program (PPG) to enhance PAI teacher professionalism. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam*, 3(1), 112–129.
- Ragil, Y. A. (2025). Implementasi kebijakan penyelenggaraan PPG PAI pada LPTK: studi kasus dan implikasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 51–70.
- Zid, M. (2021). Evaluasi pelaksanaan program PPG terhadap

- kompetensi guru: kajian empiris. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(2), 142–155.
- Fitriyah, L. (2025). Evaluating teacher professional allowance distribution: local implementation and equity issues. *Entita: Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 77–98.
- Putri, R. K. A. (2025). The impact of large-scale continuing professional development on teacher professionalism. *Jurnal Al-Ishlah Pendidikan Islam*, 13(1), 73–89.
- Haniya, H. (2024). Implementasi sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA): tantangan dan peluang. *Repository UIN Sunan Kalijaga* (tesis).
- Nariyah, D. A. (2025). Implementasi aplikasi SIAGA dalam layanan kelayakan penerima Tunjangan Profesi Guru. *Jurnal Risalah Pendidikan Islam*, 5(1), 101–118.
- Sari, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Program PPG terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–160.
- Norman, E. (2025). Managing teacher competence improvement through leadership and professional development: A systematic review (2020–2025). *JEMR: Journal of Educational Management Review*, 5(2), 12–38.
- Wulandari, J. E. (2025). Promoting teachers' professionalism in primary school: leadership and managerial practices. *International Journal of Research in Education and Reform*, 6(1), 49–67.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2022). *Research Methods in Education* (8th ed.). Routledge.
- Koordinasi PPG UIN Sunan Gunung Djati. (2024). *Laporan koordinasi pengelolaan data peserta PPG tahun 2024*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati (laporan internal).
- Kurniasih, S. R. (2023). Analisis sistem tunjangan profesi: mekanisme dan tantangan pengelolaan TPG bagi guru PAI. *Jurnal Annawa: Administrasi Pendidikan Islam*, 6(2), 33–52.
- Hatifah, H. (2025). The management of teacher professionalism development program at Madrasah Aliyah: planning, organizing, actuating, and controlling. *Attalim: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 88–105.
- Febriani, E. W. (2024). Criteria for teacher professionalism and processes of increasing teacher performance professionalism. *SIGNIFICANT: Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(3), 99–116.

- Junaidi, A. (2025). Dampak pemberian Tunjangan Profesi terhadap kinerja guru: studi kuasi-eksperimen di kabupaten X. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 4(1), 15–34.
- Anwar, M. (2021). Teacher professional development in Indonesia: a comparative study with global practices. *International Journal of Educational Development*, 80, 102–118.
- Arifin, Z., & Santoso, B. (2022). Digital infrastructure and teacher professional development: challenges in remote areas. *Journal of Educational Technology and Society*, 25(4), 210–224.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Program dan Layanan SIMPATIKA Tahun 2021–2023*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fahrina, R., & Hidayatullah, M. (2023). Local innovations in managing teacher professional allowances: lessons from regional offices. *Jurnal Manajemen Publik Pendidikan*, 2(2), 59–80.